

PORTOFOLIO

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dosen Pengampu :

Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.

Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A.

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Kelompok 3

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Irenius Juni Nugroho | 2313031032 |
| 2. Zahra Syafitri T. | 2313031035 |

PROGRAM S-1 PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ANALISIS ARTIKEL

Analisis Artikel 1

A. Identitas Artikel

1. Judul artikel : Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Swasta
2. Penulis : Munifah, M.Kom
3. Tahun terbit : 2021
4. Tujuan : Perbedaan Antara Laporan Keuangan Sektor Publik Dengan Sektor Swasta

B. Isi Artikel

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Kemudian, terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Laporan Keuangan Sektor Publik	Laporan Keuangan Sektor Swasta
<ul style="list-style-type: none">- Tujuan organisasi nonprofit motive- Sumber pendanaan berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, BUMN/BUMD, penjualan asset negara, dll- Pertanggungjawaban kepada masyarakat public dan parlemen (DPR/DPRD)- Karakteristik anggaran terbuka untuk publik- Sistem akuntansi yang digunakan yaitu cash basic	<ul style="list-style-type: none">- Tujuan organisasi profit motive- Sumber pendanaan berasal dari pembiayaan internal yaitu modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal yaitu utang bank, obligasi, penerbitan saham.- Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur- Karakteristik anggaran tertutup untuk publik- Sistem akuntansi yang digunakan yaitu accrual basic

C. Kesimpulan

Artikel tersebut membahas secara singkat mengenai ap aitu laporan keuangan sektor publik. Pada artikel ini menyajikan perbedaan diantara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta.

Laporan keuangan sektor publik ditujukan untuk organisasi nonprofit motive yang memperoleh sumber dana dari pajak, retribusi, obligasi pemerintah, BUMN/BUMD, dll. Sementara laporan keuangan sektor swasta ditujukan untuk organisasi profit motive dengan sumber dana internal, seperti dari modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, dll. Perbedaan lainnya, laporan akuntansi sektor publik menggunakan sistem akuntansi cash basic, sementara laporan keuangan sektor swasta menggunakan sistem akuntansi accrual basic.

Sumber : "[LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA](#)"|D3
[Komputerisasi Akuntansi A.Md.Kom \(stekom.ac.id\)](#)

Analisis Artikel 2

A. Identitas Artikel

- 1. Judul artikel : Laporan Keuangan Sektor Publik, Bedanya dengan Swasta?**
- 2. Penulis : Jurnal entrepreneur**
- 3. Tahun terbit : 2022**
- 4. Tujuan : memahami akuntansi sektor publik dan karakteristiknya**

B. Isi Artikel

Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa, laporan keuangan adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Sektor publik adalah gabungan dari berbagai macam organisasi yang kompleks dan banyak jenisnya mulai dari pemerintahan, badan usaha milik negara dan masyarakat.

Drebin et al (1981) melakukan identifikasi bahwa ada sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan sektor publik. Berikut daftarnya:

- Pembayar Pajak
- Pemberi Dana Bantuan
- Investor

- Pengguna Jasa
- Karyawan/Pegawai
- Pemasok/Vendor
- Dewan Legislatif
- Manajemen
- Pemilih
- Badan Pengawas

Secara umum, terdapat 6 fungsi dan tujuan laporan keuangan sektor publik, yaitu:

- a. Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship)
- b. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and retrospective reporting)
- c. Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization information)
- d. Kelangsungan organisasi (viability)
- e. Hubungan masyarakat (public relation)
- f. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)

Perbedaan laporan akuntansi keuangan sektor publik dengan sektor swasta, diantaranya

Laporan Keuangan Sektor Publik	Laporan Keuangan Sektor Swasta
Fokus finansial dan politik	Fokus finansial
Kinerja diukur secara finansial dan non-finansial	Sebagian besar kinerja diukur secara finansial
Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur
Berfokus pada bagian organisasi	Berfokus pada organisasi secara keseluruhan
Melihat ke masa depan secara detail	Tidak dapat melihat masa depan secara detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan	Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi
Laporan diperiksa oleh treasury	Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen
Cash accounting	Accrual accounting

Saat ini perkembangan teknologi telah memberikan banyak sekali kemudahan, contohnya saja dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dibuat dengan lebih mudah dengan aplikasi jurnal yang menggunakan software akuntansi online.

C. Kesimpulan

Laporan keuangan sektor publik adalah laporan keuangan yang berguna untuk mengukur suatu kinerja organisasi sektor publik.

Drebin et al (1981) melakukan identifikasi bahwa ada sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan sektor publik. Berikut daftarnya:

- Pembayar Pajak
- Pemberi Dana Bantuan
- Investor
- Pengguna Jasa
- Karyawan/Pegawai
- Pemasok/Vendor
- Dewan Legislatif
- Manajemen
- Pemilih
- Badan Pengawas

Secara umum, terdapat 6 fungsi dan tujuan laporan keuangan sektor publik, yaitu:

- a. Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship)
- b. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and retrospective reporting)
- c. Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization information)
- d. Kelangsungan organisasi (viability)
- e. Hubungan masyarakat (public relation)
- f. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)

Laporan keuangan ini terdapat perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan itu misalnya, Laporan keuangan sektor publik ditujukan untuk organisasi nonprofit motive yang memperoleh sumber dana dari pajak, retribusi, obligasi pemerintah, BUMN/BUMD, dll. Sementara laporan keuangan sektor swasta ditujukan untuk organisasi profit motive dengan sumber dana internal, seperti dari modal sendiri, laba ditahan,

penjualan aktiva, dll. Perbedaan lainnya, laporan akuntansi sektor publik menggunakan sistem akuntansi cash basic, sementara laporan keuangan sektor swasta menggunakan sistem akuntansi accrual basic.

Sumber : [Laporan Keuangan Sektor Publik, Bedanya dengan Swasta? \(jurnal.id\)](#)

Analisis Artikel 3

A. Identitas Artikel

- 1. Judul artikel : What is a Public Sector Financial Report?**
- 2. Penulis : Universitas Medan Area**
- 3. Tahun terbit : 2020**
- 4. Tujuan : Memahami fungsi dan tujuan dari laporan keuangan**

B. Isi Artikel

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemberi amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemberi amanah. Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik yang semakin meningkat berimplikasi pada manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan, namun laporan keuangan bukanlah tujuan akhir dari akuntabilitas publik. Lalu apa itu laporan keuangan sektor publik? Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik.

Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai bentuk kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship), akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and retrospective reporting), informasi perencanaan dan otorisasi (planning and authorization information), kesinambungan organisasi (viability), hubungan masyarakat, sumber fakta dan angka. Tujuan umum pelaksanaan laporan keuangan sektor publik adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pengguna (wide range of users) dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. dibutuhkan oleh entitas. dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Laporan keuangan sektor publik memberikan informasi tentang sumber alokasi dan penggunaan keuangan atau sumber daya keuangan, informasi tentang bagaimana entitas membiayai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajibannya dan komitmen, informasi tentang kondisi laporan keuangan suatu entitas dan perubahannya, serta kumpulan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal pelayanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Beberapa komponen yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan sektor publik antara lain laporan posisi keuangan atau disebut juga neraca yang terdiri dari properti, aset tidak berwujud, aset keuangan, persediaan, cadangan, kewajiban tidak lancar, kas dan setara. uang tunai, partisipasi kecil, dan banyak lainnya. Selanjutnya untuk komponen keuangan sektor publik adalah kinerja keuangan yang meliputi surplus atau defisit, perubahan aktiva bersih atau ekuitas, arus kas yang memberikan informasi tentang pendapatan dan beban keuangan pada periode tertentu, kebijakan akuntansi dan pencatatan laporan keuangan.

Namun, untuk lembaga sektor publik seperti pemerintah, keuntungan bukanlah ukuran yang relevan karena organisasi pemerintah bukanlah badan usaha yang mencari keuntungan. Pemerintah bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik

C. Kesimpulan

Dalam akuntansi sektor publik dikenal pula istilah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemberi amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemberi amanah.

Fungsi laporan keuangan sektor publik adalah bentuk kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship), akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and

retrospective reporting), informasi perencanaan dan otorisasi (planning and authorization information), kesinambungan organisasi (viability), hubungan masyarakat, sumber fakta dan angka. Tujuan umum pelaksanaan laporan keuangan sektor publik adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pengguna (wide range of users) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya dibutuhkan oleh entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Beberapa komponen yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan sektor publik antara lain laporan posisi keuangan atau disebut juga neraca yang terdiri dari properti, aset tidak berwujud, aset keuangan, persediaan, cadangan, kewajiban tidak lancar, kas dan setara. uang tunai, partisipasi kecil, dan banyak lainnya. Selanjutnya untuk komponen keuangan sektor publik adalah kinerja keuangan yang meliputi surplus atau defisit, perubahan aktiva bersih atau ekuitas, arus kas yang memberikan informasi tentang pendapatan dan beban keuangan pada periode tertentu, kebijakan akuntansi dan pencatatan laporan keuangan.

Sumber : [What is a Public Sector Financial Report? - Master of Public Administration, University of Medan Area | Best Master of Public Administration Study Program in North Sumatra](#)

ANALISIS JURNAL NASIONAL

Analisis Jurnal Nasional 1

a. Identitas jurnal

1. Nama jurnal : Jurusan Akuntansi
2. Nama penulis : Visca Marsely
3. Halaman : 1 - 14
4. Volume/ No/tahun terbit : -
5. Judul jurnal : Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Sektor Publik Dengan SAP

b. Abstrak Jurnal

Thus SAP is a requirement that has the force of law in an effort to improve the quality of financial reports of government in Indonesia. Government Regulation of the SAP is the

basis for all reporting entities in presenting the financial statements as a liability to various parties, especially parties outside of the executive.

c. Pendahuluan

Standar Akuntansi Pemerintahan berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Mengetahui kesesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.”

e. Metode Penelitian

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

f. Kelebihan dan Kekurangan

Jurnal menggunakan bahasa yang baku dan jelas, tetapi jurnal tidak mencantumkan nomor, volume, dan tahun terbit.

g. Daftar Pustaka

Disusun secara sistematis dan baik, sehingga memudahkan pembaca.

h. Sumber

<http://map.uma.ac.id/2020/10/apa-itu-laporan-keuangan-sektor-publik/>

Analisis Jurnal Nasional 2

a. Identitas Jurnal

1. Nama jurnal : Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA
2. Nama penulis : Fadilatul Jannah, Yedida Cahya A. P.
3. Halaman : 26 - 33
4. Volume/ No/tahun terbit : 1/2022
5. Judul jurnal : Analisa Laporan Keuangan Sektor Publik Dan Elemenanya Untuk Penilaian Akuntabilitas Serta Kinerja Pemerintah Daerah

b. Abstrak Jurnal

Laporan keuangan adalah komponen terpenting dalam membentuk suatu akuntabilitas sektor publik serta menjadi pengukur kinerja dalam bidang keuangan bagi pemerintah daerah. Untuk segi eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tersebut berisikan informasi keuangan daerah yang dipakai sebagai acuan peninjauan dalam mengambil kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan untuk pihak internal, laporan keuangan dipakai menjadi alat dalam menilai kinerja. Dalam menyusun suatu pelaporan keuangan sektor publik yang tepat diperlukan sistem informasi akuntansi keuangan publik yang baik, dan sangat diharapkan proses pengelolaan transaksinya pun akan lebih baik juga sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang tepat.

c. Pendahuluan

Kinerja keuangan suatu perusahaan didefinisikan sebagai peluang yang baik, potensi pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. Informasi ini dibutuhkan guna mengukur potensi perubahan sumber daya ekonomi yang bisa dikendalikan kedepannya dan memperkirakan kapasitas produksi sumber daya yang dimiliki (Barlian, 2003).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kinerja keuangan PT. Cipta Daya Nusantara Manado dari 2010- 2012.

e. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara seperti melakukan dokumentasi, wawancara, kuesioner, dan kepustakaan.

f. Kelebihan dan Kekurangan

Untuk informasi jurnal sudah lengkap, hanya saja pendahuluan isinya terlalu panjang

g. Daftar Pustaka

Disusun secara sistematis dan baik, sehingga memudahkan pembaca.

h. Sumber

<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/267>

Analisis Jurnal Nasional 3

a. Identitas Jurnal

1. Nama jurnal : Jurnal Program Studi Akuntansi
2. Nama penulis : David Al Farizky
3. Halaman : 1 - 13
4. Volume/ No/tahun terbit : 2018
5. Judul jurnal : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2018)

b. Abstrak Jurnal

penyerapan anggaran belanja yang maksimal setiap tahun dengan dilaksanakannya program dan kegiatan secara efektif, pengelolaan dan pendayagunaan aset yang baik dan efektif, pemerintah daerah lebih baik berorientasi untuk infrastruktur publik daerah dalam rangka perbaikan pelayanan publik, menarik investor, dan menggerakkan perekonomian daerah.

c. Pendahuluan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) baru dimiliki tahun 2005, sejak dikeluarkan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah daerah

merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian , pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Setyaningrum dan Syafitri : 2012).

d. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015-2018 dilihat dari: (1) Analisis Laporan Realisasi Anggaran, (2) Analisis Rasio Laporan Keuangan, (3) Analisis Arus Kas.

e. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak, pertumbuhan aset, rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan arus kas bebas.

f. Kelebihan dan Kekurangan

Penulisan jurnal tidak teratur, banyak informasi mengenai jurnal kurang lengkap dituliskan, contohnya colume dan nomor jurnal tidak ada

g. Daftar Pustaka

Disajikan dari banyak sumber oleh penulis.

h. Sumber

<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JAM/article/view/267>

Analisis Jurnal Internasional

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL

Jurnal Internasional 1

A. Identitas Jurnal

1. Nama jurnal : Laporan Keuangan Konsolidasi Sektor Publik
2. Nama penulis : Wiwin Kurniasari
3. Halaman : 12-20 halaman
4. Vol/No./Tahun : 1/No.1/2013
5. Judul jurnal : Laporan Keuangan Konsolidasi Sektor Publik (Perbandingan Beberapa Negara)
6. Keyword : Consolidated Financial Report, Public Sector, International Accounting Principles, Accountability.

B. Abstrak

Merupakan jurnal Internasional sehingga abstrak disampaikan menggunakan Bahasa Inggris. Melalui abstrak dapat diketahui sekilas apa yang akan dibahas dalam jurnal. Disampaikan dalam abstrak bahwa laporan keuangan konsolidasi sektor publik berkontribusi besar dalam penentuan keputusan-keputusan sektor publik. Pembahasan dalam jurnal akan menggunakan perbandingan dari beberapa negara.

C. Pendahuluan

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai: 1) kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2) kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan; 3) jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4) bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5) posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6) perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan peranan pelaporan keuangan Pemerintah Indonesia tersebut maka dibutuhkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Indonesia sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk

Prosedur konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa meneliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

D. Tujuan Penelitian

Artikel ini menyoroti fitur dari konsolidasi pendekatan di sektor publik, dihal standar akuntansi, konsolidasi aturan dan standar akuntansi, konteks yang standar akuntansi telah dibentuk publik atau swasta), dan kriteria untuk mengidentifikasi area konsolidasidi negara-negara lain maupun konsolidasi standar internasional.

E. Kelebihan dan Kekurangan

Abstrak yang disajikan telah memberikan gambaran umum yang sesuai dengan nisai artikel. Karena merupakan jurnal internasional dan menggunakan Bahasa Inggris, jurnal ini dapat dipelajari oleh lebih banyak pembaca. Artikel ini telah menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai laporan keuangan konsolidasi sektor publik dengan membandingkan implementasinya di beberapa negara.

F. Daftar Pustaka

Kurniasari, Wiwin. 2013. Laporan Keuangan Konsolidasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 1. ([View of LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI SEKTOR PUBLIK \(Perbandingan Beberapa Negara\) \(ustjogja.ac.id\)](#))

Jurnal Internasional 2

A. Identitas Jurnal

1. Nama jurnal : Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Informasi Akuntansi Teknologi, Tentang Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Desa

2. Nama penulis : Yenti Astari Dewi, Nasfi, Mai Yuliza
3. Halaman : 190 - 203
4. Vol/No./Tahun : 5/1/2021
5. Judul jurnal : Jurnal Internasional Riset Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi(IJEBAR)
6. Keyword : Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Nagari Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, Dana Desa.

B. Abstrak

Merupakan jurnal Internasional sehingga abstrak disampaikan menggunakan Bahasa Inggris. Melalui abstrak dapat diketahui sekilas apa yang akan dibahas dalam jurnal. Disampaikan dalam abstrak bahwa dilakukan penelitian terhadap implementasi tanggung jawab pengelolaan dana desa. Penelitian menggunakan statistika.

C. Pendahuluan

Penggunaan alokasi Dana Desa telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain berupa pembangunan jalan Desa, jembatan Desa, sambungan air bersih Desa, tambatan perahu, PAUD, Polindes, Sumur Desa , drainase, irrigasi, posyandu, dan pasar Desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mengurangi persentase penduduk miskin (Indrawati, 2017)

Penelitian dan pembahasan dibatasi pada Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, dan Kompetensi Aparatur Nagari/Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintahan Nagari/Desa di Agam. Tujuan penelitian adalah untuk melihat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa/nagari dan pengaruh penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa serta untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa/nagari. aparatur tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari di Kabupaten Agam.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif dari pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap akuntabilitas.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu suatu proses pencarian pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka-angka sebagai sarana untuk menemukan informasi tentang apa yang ingin diketahui (Suharsaputra, 2012). Periode penelitian adalah November 2019 hingga Juni 2020, dimana Pemerintahan Nagari/Desa berada di Kabupaten Agam. Variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008). Variabel penelitian, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang merupakan akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Variabel terikat (Bound) adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknik pengumpulan data dengan skala Likert ini menggunakan lima poin penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Tidak Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju (Sugiyono, 2008).

F. Kelebihan dan Kekurangan

Abstrak yang disajikan telah memberikan gambaran umum yang sesuai dengan isi artikel. Karena merupakan jurnal internasional dan menggunakan Bahasa Inggris, jurnal ini dapat dipelajari oleh lebih banyak pembaca. Artikel ini telah menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai bagaimana pemanfaatan informasi akuntansi teknologi dalam tanggung jawab pengelolaan dana desa.

Jurnal ini menyajikan data statistika untuk pengolahan dan hasil dari penelitian sehingga hasilnya menjadi lebih pasti.

G. Daftar Pustaka

Dewi, Yenti A, et all. 2021. Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Informasi Akuntansi Teknologi, Tentang Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Internasional Riset Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (IJEBAR)*. [INTERNAL CONTROL SYSTEM, UTILIZATION OF ACCOUNTING INFORMATION TECHNOLOGY, ON VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY | Dewi | International Journal of Economics, Business and Accounting Research \(IJEBAR\) \(stie-aas.ac.id\)](#)

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 2015			TAHUN ANGGARAN 2014 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI THD ANGGARAN	
A Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	0,00	74.318.678,00		- 125.825.929,00
Jumlah Pendapatan		0,00	74.318.678,00		- 125.825.929,00
B BELANJA	B.2.				
- Belanja Pegawai	B.2.1.	36.108.550,00,00	34.785.601.664,00	96,34	31.846.652.369,00
- Belanja Barang	B.2.2.	9.933.085.000,00	9.468.010.295,00	95,32	9.787.138.044,00
- Belanja Modal	B.2.3.	1.428.100.000,00	1.344.587.000,00	94,15	646.883.450,00
Jumlah Belanja		47.469.735.000,00	45.598.198.959,00	96,06	42.280.673.883,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

II. NERACA

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam rupiah)

	NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
	ASET			
ASSET LANCAR		C.1		
- Persediaan		C.1.2	386.410.178,00	478.343.672,00
JUMLAH ASSET LANCAR			386.410.178,00	478.343.672,00
ASSET TETAP		C.2		
- Tanah		C.2.1	12.039.226.774,00	12.039.226.774,00
- Peralatan dan Mesin		C.2.2	6.614.997.481,00	5.873.191.481,00
- Gedung dan Bangunan		C.2.3	11.728.659.400,00	11.125.878.400,00
- Aset Tetap Lainnya		C.2.4	149.213.094,00	149.213.094,00
- Akumulasi Penyusutan		C.2.5	(8.574.227.199,00)	(7.414.651.964,00)
JUMLAH ASSET TETAP			21.957.869.550,00	21.772.857.785,00
ASSET LAINNYA		C.3		
- Aset Tak Berwujud		C.3.1	55.403.689,00	55.403.689,00
- Akumulasi Penyusutan		C.3.2	0,00	0,00
JUMLAH ASSET LAINNYA			55.403.689,00	55.403.689,00
JUMLAH ASSET			22.399.683.417,00	22.306.605.146,00
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		C.4		
- Utang Kepada Pihak Ketiga		C.4.1	46.150.141,00	39.424.960,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			46.150.141,00	39.424.960,00
JUMLAH KEWAJIBAN			46.150.141,00	39.424.960,00
EKUITAS		C.5		
- Ekuitas Dana Lancar		C.5.1		438.918.712,00
- Ekuitas Dana Investasi		C.5.2		21.828.261.474,00
- Ekuitas		C.5.3	22.353.533.276,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			22.399.683.417,00	22.306.605.146,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1	
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1	
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	30.526.342,00
Jumlah Pendapatan Operasional	D.1.1	30.526.342,00
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2	
- Beban Pegawai	D.1.2.1	34.789.604.121,00
- Beban Persediaan	D.1.2.2	396.985.836,00
- Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	1.440.049.352,00
- Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	917.151.743,00
- Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	6.810.709.124,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	1.159.575.235,00
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)	D.1.2	45.514.075.411,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1.- D.1.2)	D.1	(45.483.549.069,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2.1	
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.1	43.792.336,00
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.2	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.1.1-D.2.1.2)	D.2.1	43.792.336,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D.2	43.792.336,00
SURPLUS/(DEFISIT) - LO (D.1 + D.2)		(45.439.756.733,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2015

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	E.1	22.267.180.186,00
SURPLUS(DEFISIT) - LO	E.2	(45.439.756.733,00)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	E.3	
- Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	2.229.542,00
Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		2.229.542,00
DAMPAK MUKULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/		
KESALAHAN MENDASAR	E.4	0,00
- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan		
Mendasar		0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	45.523.880.281,00
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2 + E.3 + E.5)		86.353.090,00
EKUITAS AKHIR	E.6	22.353.533.276,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.